

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan tentunya harus terbebas dari kriminalitas yang merupakan suatu masalah yang cukup sulit teratasi oleh berbagai negara terkhususnya bagi negara berkembang. Meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat yang cukup tinggi, tantangan-tantangan dalam hal pembangunan seperti kesejahteraan masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan kesejahteraan kepala rumah tangga yang masih belum terselesaikan secara memadai, Todaro (2001:21).

Kriminalitas adalah pelanggaran hukum dan beberapa norma sosial yang berlaku sehingga dapat merugikan kehidupan berkomunitas. Dampak negatifnya termasuk menciptakan perasaan ketidakamanan, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di masyarakat, Lumenta (2012). Indonesia sebagai memiliki Jumlah kriminalitas yang masih tergolong sedang jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Namun walaupun begitu, masalah kriminalitas yang dihadapi Indonesia merupakan permasalahan yang cukup besar dan sulit untuk diatasi.

Menurut *Uniform Crime Reporting, 2011* penyebab dan asal-usul kejahatan disebabkan oleh beberapa disiplin ilmu. Salah satu contoh yang diketahui menyebabkan volume dan jenis kejahatan yang terjadi di suatu

tempat adalah keadaan ekonomi, seperti pendapatan rata-rata, Jumlah penduduk yang miskin, dan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Sementara menurut *Ministry of justice*, 2009 Variabel ekonomi juga turut mempengaruhi perilaku kriminal seperti relatif kekayaan, kemiskinan, dan pengangguran. Pada era modernisasi seperti saat ini juga ikut berevolusi yang tentunya memberi dampak pada pertukaran budaya antar negara. Nilai-nilai yang masuk ke dalam negeri tidak selalu nilai positif yang membangun, nilai-nilai negative juga ikut serta yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

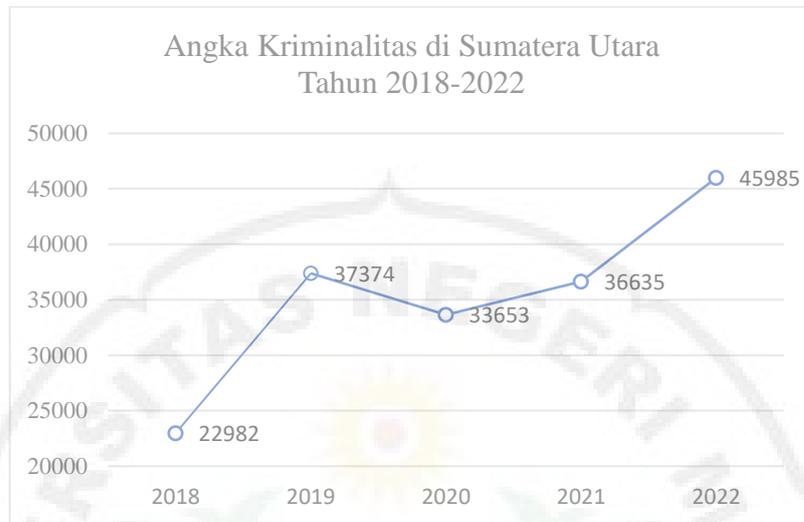
Pada era Globalisasi saat ini pemenuhan keinginan juga cukup melimpah. Untuk memenuhi keinginan tersebut maka diperlukan *skill* yang cukup. Namun kurangnya keahlian seseorang seringkali menyebabkan pemaksaan terhadap pemenuhan kebutuhannya sehingga cenderung ingin mendapatkan secara instan dan mengupayakan segala cara termasuk Tindakan kejahatan untuk menolong kehidupannya (Dermawanti,2015).

Hardianto (2009) berpendapat bahwa kejahatan pada umumnya timbulnya karena latar belakang perekonomian yang cenderung masih kurang. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah upah dan angka kriminalitas di Indonesia. Rendahnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat menyebabkan peningkatan angka kriminalitas di kabupaten/kota tersebut. Rendahnya kemampuan dan pencapaian seseorang menyebabkan pemenuhan kebutuhan hidup masih kurang dikarenakan terjadi kesenjangan pendapatan yang diperoleh maka terjadilah aksi kriminal yang lebih menguntungkan daripada mengupayakannya secara legal. Tindakan kriminal ini juga dapat

disebabkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, konflik dan kesadaran hukum. Disamping itu modernisasi juga dapat mempengaruhi sekaligus mendorong serta memudahkan terjadinya berbagai kejahatan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Rahmalia, 2019).

Saat ini, masalah kejahatan semakin kompleks dan telah menyebar ke semua kalangan masyarakat di Indonesia. Berbagai lingkungan yang berbeda dapat memberi pengaruh kepada seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal, terutama di Kota-kota besar. Keberadaan lingkungan tersebut dapat memudahkan pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki Jumlah kriminalitas yang tinggi adalah Sumatera Utara hal ini dapat dilihat dari total kasus kriminalitas.

Berdasarkan data yang diambil dari BPS Sumut, Selama tahun 2018 hingga 2022 jumlah tindakan kriminal di Sumatera Utara berfluktuasi, namun dalam hal ini trendnya cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun artinya pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal untuk menurunkan angka kriminalitas di Sumatera Utara, namun belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu kasus kriminalitas perlu dikaji dan diteliti dari berbagai perspektif dan berbagai sudut pandang yang berbeda guna untuk menemukan permasalahan dan upaya percepatan penurunan angka kriminalitas sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Dibawah ini merupakan grafik trend angka kriminalitas di Sumatera Utara yang disajikan dalam Gambar 1.1



*Sumber: BPS SUMUT, 2023*

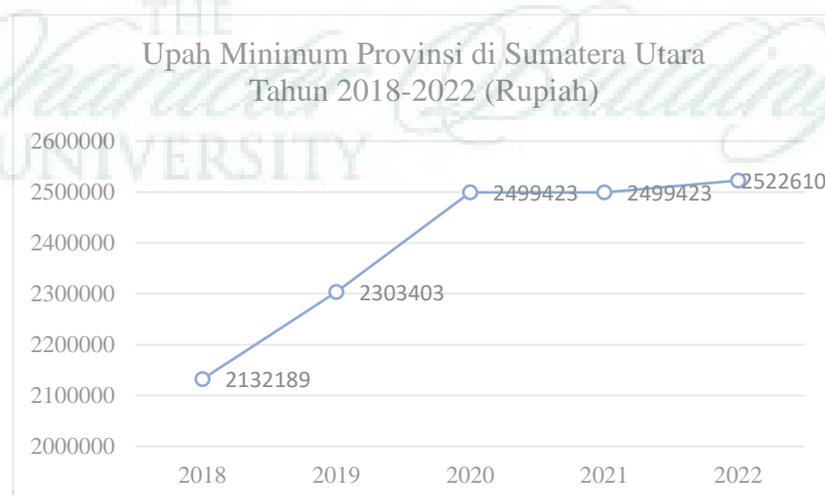
Gambar 1.1 Menunjukkan jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Jumlah kejahatan secara keseluruhan tersebut merupakan total dari kasus pidana dan perdata dimana jenis kejahatan digolongkan ke dalam kedua kasus tersebut. Adapun tindakan pidana merupakan penyelewengan dan tindakan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, sementara tindakan perdata adalah semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang termasuk untuk mengursi kepentingan individu. Menurut Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, jumlah kejahatan didominasi oleh tindakan pidana. Saat ini pihak kepolisian melaporkan jenis kejahatan sebagai kasus paling besar adalah pencurian dan narkoba

Berdasarkan jumlah kasus dan tindakan tersebut salah satunya disebabkan oleh beberapa faktor perekonomian. Pigou (1960) berpendapat bahwa beberapa variabel ekonomi dan kebijakan public memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan sosial, dan pengukuran uang dapat digunakan sebagai indicator dalam mengevaluasi dan membandingkan kesejahteraan di berbagai situasi atau

kondisi yang berbeda. Tingginya jumlah kejahatan yang terjadi dapat diatasi dengan hukuman atau meningkatkan upah pendapatan, Dari, S. W. (2022). Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi Jumlah kriminalitas, penetapan jumlah upah dimasing-masing daerah adalah berbeda-beda penetapan jumlah upah disetiap daerah dipengaruhi oleh analisis kebutuhan layak hidup dan beberapa faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marjinal. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut pemerintah perlu lebih teliti agar dapat terhindar dari sejumlah masalah seperti Jumlah pelanggaran yang tinggi sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan

Penetapan upah minimum setidaknya mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja, pada kenyataannya Jumlah analisis tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan. Beberapa perusahaan masih banyak memberi upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga para pekerja tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya, Izzaty & Rafika Sari (2013)

Berikut ini merupakan upah minimum provinsi di Sumatera yang sudah ditetapkan disajikan dalam Gambar 1.2



Sumber: BPS SUMUT, 2023

Berdasarkan sajian data pada gambar 1.2 menunjukkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) di Sumatera Utara seharusnya sudah dapat memenuhi rata-rata pengeluaran. Grafik diatas menunjukkan upah minimum provinsi di Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dilihat angka kriminalitas pada tahun 2018-2019, mengalami peningkatan, selain itu pada tahun 2021-2022 juga mengalami peningkatan, kenaikan upah seharusnya diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas, namun pada kenyataannya Jumlah kejahatan masih banyak terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Menurut teori Keynes untuk mencapai penggunaan tenaga kerja yang penuh, tidak boleh ada pengangguran dalam system tersebut. Didalam kondisi ini tidak akan ada orang yang tidak bekerja, individu-individu akan bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah daripada tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan mereka. Salah satu aspek penting lainnya dalam ekonomi Keynesian adalah pengembangan teori-teori baru mengenai pengangguran. Pengangguran yang bersifat kronis menjadi tantangan bagi teori ekonomi. Biasanya, para ekonom meyakini bahwa adanya kelebihan penawaran tenaga kerja akan memberikan tekanan pada tingkat upah. Penurunan upah akan berkontribusi pada pengurangan pengangguran dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja (Mulyadi S, 2017). Gambar 1.3 berikut ini merupakan data pengangguran di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.



Sumber: BPS SUMUT, 2023

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas, dimana semakin besar Jumlah pengangguran, maka semakin besar pula keinginan untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Rangga 2020).

Pada tahun 2019-2020 jumlah pengangguran melonjak pesat, namun jika dibandingkan dengan jumlah kriminalitas di Sumatera Utara pada tahun yang sama malah menurun. Jumlah pengangguran yang tinggi mau tidak mau tidak ada pilihan lain untuk para pekerja selain bertahan walaupun kebutuhan tidak dapat maksimal terpenuhi hal inilah yang mendorong masyarakat Sumatera Utara semakin dekat dengan garis kemiskinan.

Secara umum kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor sebagaimana merupakan masalah yang sangat serius bagi negara berkembang. Kemiskinan telah menjadi persoalan terbesar Indonesia. Masalah kemiskinan begitu kompleks dan berkaitan dengan banyak aspek, baik aspek sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Seperti diketahui sebelumnya, sangat sulit untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

yang sangat serius dari pemerintah, karena kemiskinan membuat banyak kebutuhan sulit terpenuhi.

Terdapat salah satu provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara yang memiliki Jumlah kemiskinan yang tinggi. Menurut data BPS 2023 Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara berfluktuasi. Beberapa faktor yang mengakibatkannya adalah ketidaksesuaian upah dengan kebutuhan, kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta berbagai faktor lainnya. Fluktuasi jumlah penduduk miskin tersebut disajikan dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS SUMUT. 2023

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengatakan rendahnya kemampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya disebabkan oleh tingginya beban hidup namun tidak diimbangi dengan pendapatan atau upah yang diterima oleh pekerja. Jumlah kemiskinan yang tinggi juga cenderung mempengaruhi terjadinya kriminalitas, namun jika dilihat dari data diatas, pada tahun 2019-2020 jumlah kemiskinan meningkat sementara ditahun yang sama angka kriminalitas mengalami penurunan, pada tahun 2021-2022

juga dapat dilihat angka kriminalitas meningkat sementara pada tahun yang sama jumlah kemiskinan menurun. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis akan melakukan kajian penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Angka Kriminalitas Di Sumatera Utara Tahun 2018-2022”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Sumatera Utara memiliki jumlah Kabupaten dan Kota yang banyak. Sehingga merupakan objek yang menarik untuk diidentifikasi variabel yang bermasalah pada Kabupaten dan Kota agar dapat mengestimasi keadaan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa persoalan sebagai masalah yaitu:

1. Kriminalitas di Sumatera Utara belum dapat diatasi dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan fluktuasi pada Jumlah kriminalitas tersebut.
2. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang sudah tepat berdasarkan beberapa analisis ekonomi di daerah Sumatera Utara, namun pengawasan terhadap pemberian upah kepada tenaga kerja belum maksimal karena masih ditemukan perusahaan memberikan upah dibawah standar ketetapan
3. Pengangguran dalam hal ini data yang diambil adalah jumlah penduduk yang menganggur, sudah mengalami penurunan pada tahun 2018-2019 namun kembali meningkat pada rentang tahun 2021-2022

4. Seseorang belum sepenuhnya mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak menimbulkan kenaikan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara yang berpotensi mempengaruhi kenaikan Jumlah kriminalitas.

### 1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan dibatasi dengan

1. Objek penelitian adalah Sumatera Utara tahun 2018-2022
2. Variabel terikat yang digunakan adalah Angka kriminalitas yang diukur dengan jumlah kasus kriminalitas berdasarkan total kasus pidana dan kasus perdata di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022
3. Variable bebas yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022

### 1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh terhadap Jumlah angka kriminalitas di Sumatera Utara tahun 2018-2022?
2. Apakah pengangguran memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara Tahun 2018-2022?
3. Apakah jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara Tahun 2018-2022?

4. Apakah upah minimum provinsi (UMP), pengangguran dan jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara Tahun 2018-2022?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara 2018-2022
2. Untuk mengetahui apakah pengangguran memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara tahun 2018-2022
3. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui apakah upah minimum provinsi (UMP), pengangguran, dan jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh terhadap angka kriminalitas di Sumatera Utara tahun 2018-2022

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan maksud agar bermanfaat untuk:

1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Menjadi referensi informasi Pemerintah Provinsi Daerah Sumatera Utara, terkhusus Pemerintah Kabupaten/kota untuk menganalisis masalah terkait dengan penanggulangan kriminalitas di Sumatera Utara, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kedepannya.

## 2. Pendidikan

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Universitas Negeri Medan, yang dapat digunakan untuk menambah Pustaka literasi sehingga bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis serta dapat menjadi pertimbangan dari kajian yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan

## 3. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan menjadi informasi yang tepat sebagai bahan edukasi bagi masyarakat untuk mempelajari beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan terjadinya kriminalitas,

